

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI KOTA SEMARANG TAHUN 2019

Muhammad Aldi Nur Saputra
Maldins48@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Semarang

ABSTRAK

This research is motivated by the many policies issued by the Government to alleviate poverty, one of which is the Non-Cash Food Assistance program. However, seeing the phenomena that occur in the distribution of this program, there are several obstacles, one of which is the inaccurate target, there are still many people who are able to receive assistance, while those who are truly unable are not recorded in the recipients of this program assistance. Then there was the delay in making KKS for KPM, and there were still people who could not withdraw BPNT there were also those whose balance on the KPM card was zero than what it should have been Rp. 110,000, - per month and there are recipients who are recorded but only received one aid and never received any more assistance. This study aims to determine how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) policy in North Semarang District as the largest recipient of assistance and Tugu District as the lowest aid recipient. The theory used in this research is George C. Edwards III theory. There are four dimensions that influence the success of Policy Implementation, namely Communication, Resources, Implementing Disposition, Bureaucratic Structure. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach, the types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, observation and documentation study. The informants in this study were the Head of Social Welfare Section of Tugu and North Semarang Subdistricts, the District Coordination Team, the owner of the e-warong agent, the Recipient Community.

Research Results The Implementation of BPNT Program Policies in Semarang City, especially North Semarang District has not been implemented optimally. This shows that there are several factors that are still experiencing problems. There are significant obstacles or problems, namely there are still people who feel that this assistance is deemed insufficient to meet the basic needs of the household, there are still inaccurate BPNT recipients, lack of socialization resulting

in a lack of public understanding, and delays in making KKS KPM cards and delays in rice distribution due to the large number of KPM in North Semarang District.

The conclusion of this research is that at the point of communication, the implementation still needs to be improved again because factors that are found to be obstacles between program implementers and program targets have found a gap where not all people know BPNT and just accept the lack of public awareness to realize this program is indeed targeted. -True for people who cannot afford and have not received food assistance, so as not to cause targets that are not on target. at the point of implementing resources from human resources as implementers of the BPNT program, human resources who provide services are responsive enough in handling complaints and friendly when handling related questions about BPNT so as to provide comfort and convenience for the community, but in terms of budget implementation still needs to be reviewed again due to the increase in food prices which the government did not anticipate in terms of disposition, looking at the characteristics of policy administrators who have good honesty and commitment, this is evidenced by the parties who have tried to work together to provide information about the BPNT program to the public. In the implementation of the mechanism, from registration to medical services, it has been carried out quite well, it is proven that the KPM received a letter from the kelurahan delivered by the local RT / RW for KPM participation in BPNT. Then the KPM was directed to the kelurahan to include the KK and KTP of the head of the family which were considered quite easy.

Keywords: Non-Cash Food Aid, Semarang, Implementation, Social Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai. Namun melihat fenomena yang terjadi dalam penyalurannya program ini mengalami beberapa kendala salah satunya yaitu belum tepatnya sasaran, masih banyak masyarakat yang mampu namun mendapatkan bantuan sedangkan yang benar-benar tidak mampu sama sekali tidak terdata dalam penerima bantuan program ini. Kemudian keterlambatan pembuatan KKS para KPM, dan masih ada masyarakat yang tidak bisa mencairkan BPNT ada juga yang saldo di kartu KPM nol dari yang seharusnya masuk sebesar Rp. 110.000,- perbulan dan ada penerima yang terdata namun hanya mendapat satu kali bantuan saja dan tidak pernah mendapatkan lagi bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Semarang Utara sebagai penerima bantuan terbanyak dan Kecamatan Tugu sebagai penerima bantuan terendah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori George C. Edwards III. Terdapat empat dimensi yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Pelaksana, Struktur Birokrasi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tugu dan Semarang Utara, Tim Koordinasi Kecamatan, Pemilik Agen e-warong, Masyarakat Penerima.

Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Program BPNT di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Semarang Utara belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terlihat ada beberapa faktor yang masih mengalami kendala. Adapun hambatan atau permasalahan yang berarti yakni masih ada masyarakat yang merasa bahwa bantuan ini dirasa kurang memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, masih adanya ketidaktepatan penerima BPNT, kurangnya sosialisasi sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat, dan keterlambatan pembuatan kartu KKS KPM dan keterlambatan pendistribusian beras dikarenakan banyaknya KPM di Kecamatan Semarang Utara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada poin komunikasi implementasinya masih harus diperbaiki lagi karena ditemukan faktor yang menjadi kendala antara pelaksana program dan target

program yang ditemukan adanya *gap* dimana belum semua masyarakat mengetahui BPNT dan hanya menerima saja kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyadari program ini memang di targetkan benar-benar untuk masyarakat yang tidak mampu dan belum menerima bantuan pangan, sehingga tidak menyebabkan adanya target yang tidak tepat sasaran. pada poin sumber daya implementasi dari sumber daya manusia sebagai implementor program BPNT sumber daya manusia yang memberikan layanan sudah cukup responsif dalam menangani keluhan dan ramah apabila menangani pertanyaan terkait seputar BPNT sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat namun dari segi anggaran dalam implementasinya masih harus dikaji lagi karena adanya kenaikan harga sembako yang kurang diantisipasi oleh pemerintah pada segi disposisi yang melihat pada karakteristik penyelenggara kebijakan yang memiliki kejujuran dan komitmen yang juga cukup baik hal ini dibuktikan dengan pihak-pihak yang telah berupaya bersinergi memberikan informasi tentang adanya program BPNT kepada masyarakat. Pada implementasi mekanisme dari mulai pendaftaran hingga layanan pengobatan sudah cukup terlaksana dengan baik terbukti KPM menerima surat dari kelurahan yang dihantarkan oleh RT/RW setempat untuk kepesertaan KPM dalam BPNT. Selanjutnya KPM diarahkan ke kelurahan untuk menyertakan KK dan KTP kepala keluarga yang dinilai cukup mudah.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Semarang, Implementasi, Kesejahteraan Sosial

I. PENDAHULUAN

Demi menanggulangi kemiskinan pemerintah melalui Kementerian Sosial menciptakan banyak program bantuan social diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) yang diciptakan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat tidak mampu dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Data BPNT masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya. Namun penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak hanya peserta program keluarga harapan (PKH) saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain- lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di kota Semarang yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi 16 Kecamatan di Kota Semarang, sebanyak 39.013 Keluarga Penerima Manfaat(KPM) menerima Bantuan Pangan Non-Tunai. dalam hal penyaluran bantuan Dinas Sosial Kota Semarang memperoleh kuota tersendiri dari Kementerian Sosial RI sebanyak 39.031, pada kelurahan Tugu dan Semarang Utara memiliki jumlah presentase penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai terbanyak dan tersedikit dengan Kecamatan Tugu sebanyak 601 penerima Bantuan dan Semarang Utara dengan 3.856 penerima bantuan. Pada hal ini fokus kajian peneliti adalah mengetahui, mendeskripsikan serta dapat menjelaskan dengan mengambil sampel pada kedua Kecamatan terkait yaitu melalui Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Utara. Kecamatan Tugu dan Semarang Utara tersebut juga masih belum tepat sasaran, menurut salah seorang warga dari hasil pengamatan sementara mengatakan bahwa bantuan non tunai di Kecamatan Tugu dan Semarang Utara melalui E-Warong di salah satu kelurahan tersebut belum

tepat sasaran, seperti beras, gula, minyak goreng, dan ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kecukupan secara materil akan tetapi dapan bantuan tersebut, bantuan juga di salurkan kepada keluarga terdekat walaupun keluarga itu tergolong mampu secara ekonomi. Dalam penyaluran bantuan banyak kendala yang dialami Dinas Sosial Kota Semarang yang akan dibahas lebih lanjut didalam Bab Pembahasan mengenai pengimplementasian Bantuan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan di Kota Semarang. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Implementasi Program Penerima Bantuan Pangan Non Tunai(BNPT) di Kota Semarang Tahun 2019.”**

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dan mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dan saling mendukung agar tidak menghasilkan kesimpulan yang tidak diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara kualitatif, yaitu tipe penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena apa yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara tertulis maupun lisan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 1989:6).

III. PEMBAHASAN

a. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) Kota Semarang Tahun 2019

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Kota Semarang secara keseluruhan dapat memenuhi tiga prinsip dalam komunikasi. Hal itu dapat dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dan dengan komitmen tersebut membuat informasi dapat diterima secara menyeluruh kepada seluruh penerima kebijakan. Pelaksanaan dari variabel komunikasi dapat dijelaskan lebih rinci pada uraian sebagai berikut.

1.1. Transmisi Komunikasi

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung(E-Warong)

pada pasal 1 ayat 1. Dari peraturan Menteri tersebut terciptalah inovasi program Bantuan Pangan Non Tunai Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah. (Pedoman Pelaksanaan BPNT 2019). Bantuan Pangan Non Tunai bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2019, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

Dalam hal mentransformasikan kebijakan, Pemerintah Kota Semarang bersama Dinas Sosial Kota Semarang melakukan sosialisasi menyoar pada Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah termasuk TKPK dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan, Perangkat desa/aparatur kelurahan dan jajaran di bawahnya; Tenaga Pelaksana BPNT, KPM, Pemilik/pengelola e-Warong, Bank Penyalur baik di tingkat pusat maupun cabang; dan Masyarakat umum. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau Dana Desa/ Kelurahan, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

1.2. Kejelasan Komunikasi

Kejelasan Komunikasi dalam implementasi program suatu kebijakan adalah kejelasan tujuan dan cara yang akan dilakukan dalam sebuah kebijakan agar semua pihak yang menerima dan menjalankan dapat memahami pelaksanaan kebijakan tersebut ketika di implementasikan. Ketegasan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Semarang berlandaskan pada PERPRES 63 Tahun 2017, lalu diturunkan kepada PERMENSOS 11 Tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial lalu diturunkan di PERGUB JATENG Nomor 53 Tahun 2018. Dari dasar peraturan hukum tersebut dibuatlah Buku Pedoman Pelayanan BPNT yang dibuat oleh Kementerian Sosial, buku tersebut memuat tahapan persiapan, edukasi dan sosialisasi, registrasi dan distribusi KKS, Penyaluran, dan Pemanfaatan. Pedoman Umum ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pelaksana program, yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur BPNT, e-Warong sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya. Pada buku pedoman ini, tujuan dari BPNT sesuai dengan peraturan tersebut dan sesuai yang ada pada buku panduan adalah Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM

1.3. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi implementasi kebijakan yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pihak-pihak pelaksana. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Berjalanya program BPNT di Kota Semarang melalui tugas pokok dan fungsinya disesuaikan dengan tujuan-tujuan Bantuan Pangan Non Tunai. Pada PERMENSOS

Nomor 11 Tahun 2018 Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. Dalam pelaksanaannya aparatur tim koordinasi BPNT yang di koordinir oleh Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

2.Sumber Daya

Faktor sumber daya yang dimaksud disini adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu, ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal pembentukan staff pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Semarang telah dibentuk melalui PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018 dan ditindak lanjuti melalui SK Walikota Nomor 460/125 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan di Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, staff yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang meliputi Koordinator PKH, Tim Koordinator Kota Dinas Sosial serta Staff bidang Penanganan Fakir Miskin Perkotaan (PFM Perkotaan). Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dalam hal penyaluran kepada masyarakat Dinas Sosial Kota Semarang bersama dengan BNI menyediakan E-Warong dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai fasilitas yang digunakan untuk memanfaatkan nominal yang sudah ada dalam kartu tersebut menjadi bahan-bahan sembako. Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Semarang dalam hal anggaran berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap pagu KPM di Kota Semarang yang terus berkurang dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Anggaran tersebut diperoleh dari

jumlah KPM di Kota Semarang dikalikan dengan besaran manfaat yang diterima oleh KPM setiap bulanya yakni RP. 110.000 perbulan, anggaran alokasi di Kota Semarang turun dari 4,6 Triliun menjadi 4,2 Triliun dan turun sebesar 4 triliun.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan BPNT di Kota Semarang Terkait sikap pelaksana program E-Warong yang dalam hal ini Dinas Sosial, Pendamping Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pengelola E-Warong di Kota Semarang cukup optimal dengan menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Dapat dilihat pendamping sosial sebagai pelaksana kebijakan selama ini terus aktif dalam memberikan informasi. Informasi yang diberikan terkait pertemuan, pengarahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang jadwal pengambilan bantuan jika bantuan sudah masuk untuk diambil di E-Warong, serta informasi-informasi lainnya mengenai program E-Warong. Sikap pelaksana menentukan keberjalanan suatu program dengan karakter dan komitmen pelaksana dalam menjalankan suatu program kebijakan. Kasie Kesos Kecamatan Semarang Utara dan Tugu menjalankan tugas sebagaimana sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni dalam pelaporan, monitoring, evaluasi dalam disposisi Kecamatan Semarang Utara dan Tugu memiliki karakter sesuai dengan arah kebijakan PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018, begitu juga dengan sikap dikarenakan Kasie Kesejahteraan Sosial Kecamatan langsung turun dan memantau yang terjadi di lapangan dibuatlah komunikasi melalui platform chatting sehingga kebijakan tersebut dijalankan dengan responsif dan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Dalam PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam penetapan tim koordinasi pada pasal 44 ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota, begitu juga selanjutnya diatur pada tingkatan kecamatan, dan kelurahan yang diatur masing-masing melalui Surat Keputusan Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal pelaksanaan, melalui struktur birokrasi yang jelas maka Standar Operasional Prosedur (SOP) akan terlaksana dengan baik. Pada tataran Pemerintahan Kota dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018 bahwa fungsi Dinas Sosial dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai berupa koordinasi, sosialisasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, penanganan terhadap pengaduan dan selanjutnya dituangkan dalam SK Walikota Semarang Nomor 460/125 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan di Kota Semarang.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai Kota Semarang Tahun 2019

1. Faktor Pendukung

Pada pelaksanaan kebijakan, adanya faktor pendukung menjadi pemicu keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan. Faktor pendukung sebuah kebijakan bisa dari dalam dan luar organisasi yang menjalankan sebuah kebijakan. Seperti halnya dengan pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Semarang dapat dilihat analisis faktor pendukung dari jalannya program, sebagai berikut:

1.1. Faktor Pendukung Internal

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Tugu menjadi kecamatan dengan penerima bantuan terendah. Dalam hal ini Kecamatan Tugu bersama Dinas Sosial berusaha menyampaikan dan menginformasikan mengenai kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai ini hingga ke masyarakat ke tingkat yang paling kecil, agar komunikasi mengenai bantuan pangan bisa tersampaikan ke masyarakat luas melalui pihak-pihak yang dibawah Dinas Sosial. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Tugu menjadi kecamatan dengan penerima bantuan terendah. Dalam hal ini Kecamatan Tugu bersama Dinas Sosial berusaha menyampaikan dan menginformasikan mengenai kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai ini hingga ke masyarakat ke tingkat yang paling kecil, agar komunikasi mengenai bantuan pangan bisa tersampaikan ke masyarakat luas melalui pihak-pihak yang dibawah Dinas Sosial. Kinerja antar lini membuat pelaksanaan program kebijakan semakin mudah, keefektifan kinerja sesuai dengan tupoksi kecamatan bisa dikerjakan secara baik oleh Kecamatan Tugu dengan pola komunikasi antar lini dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan menurunnya jumlah KPM per tahun dan penerima bantuan pada pendataan dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga belum muncul keluhan pada Kecamatan Tugu terkait penyaluran BPNT di Kecamatan Tugu.

1.2. Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung eksternal adalah faktor pendukung yang berasal atau dilihat dari eksternal kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Semarang, faktor eksternal yaitu dapat ditinjau yaitu dari kondisi masyarakat. Ketidakmampuan warga dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi syarat mengapa Bantuan Pangan Non Tunai diadakan dan dilaksanakan. Penyaluran BPNT di masyarakat kota Semarang menuai hal positif terhadap minat dan antusias warga. Masyarakat yang sudah terdaftar menjadi KPM antusias dengan diberikannya bantuan sehingga target pelaksana dalam hal ini masyarakat sangat aktif dalam penyaluran BPNT itu sendiri.

2. Faktor Penghambat

Pada pelaksanaan kebijakan program UHC (Universal Health Coverage) di Semarang juga terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa berpengaruh

pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan program UHC (Universal Health Coverage) di Semarang. Seperti halnya dengan pelaksanaan kebijakan program UHC (Universal Health Coverage) di Semarang dapat dilihat analisis faktor penghambat dari jalannya program, sebagai berikut:

2.1 Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal adalah faktor penghambat yang berasal atau dilihat dari internal pelaksana teknis kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Semarang. Berikut adalah faktor penghambat internal yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Semarang. Kurangnya antisipasi kenaikan harga tersebut bisa menjadi masalah bagi KPM karena pemenuhan kuantitas kebutuhan pokok kurang terpenuhi jumlahnya. Yang seharusnya KPM bisa memenuhi kebutuhan pokoknya selama satu bulan, kali ini KPM harus menghabiskannya hanya dalam jangka waktu beberapa minggu atau mungkin beberapa hari. Kurangnya pemantauan harga pangan tersebut bisa merugikan Keluarga Penerima Manfaat dan tidak hanya itu saja, gizi yang harusnya perbulan mampu terpenuhi menjadi berkurang diakibatkan kurangnya pemenuhan bahan pokok selama sebulan tersebut.

2.2. Faktor penghambat eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang dipengaruhi oleh pihak yang mendapat pelayanan yang merupakan pihak diluar organisasi. Seperti misalnya adalah masyarakat. Berikut adalah faktor penghambat internal yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Semarang. Pembiaran yang terjadi di masyarakat dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan masyarakat sekitar yang masih membutuhkan menjadi budaya yang dibiarkan terus menerus di masyarakat, padahal proses validasi butuh waktu tidak serta merta. Kesadaran masyarakat juga perlu dibangun pada masyarakat luas terutama masyarakat yang ekonominya terbantu akibat BPNT ini agar tidak membiarkan kebudayaan buruk dengan mengandalkan BPNT padahal mereka sudah mampu dan perekonomiannya meningkat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis hasil penelitian pada pelaksanaan kebijakan program UHC (Universal Health Coverage) di Semarang, peneliti telah menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik dikarenakan dalam hal pemberian bantuan pangan sebagai salah satu usaha penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Kecamatan Tugu dalam hal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai terlampaui sudah sesuai dengan arahan dan sesuai pada sasaran masyarakat. Faktor yang menjadi salah satu penyebabnya adalah banyak masyarakat Kecamatan Tugu bekerja sebagai buruh pabrik dan rata-rata warga asli Kecamatan Tugu sehingga dalam hal pendapatan sudah memenuhi dan tidak memakan 80% pendapatan dalam pemenuhan pangan perharinya, disamping itu Kecamatan Tugu memiliki populasi penduduk tersedikit dibandingkan Kecamatan Semarang Utara serta dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tugu tersedikit dibandingkan Kecamatan Semarang Utara. Berbeda dengan Kecamatan Tugu dalam hal pelaksanaan BPNT, dalam hal pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Semarang Utara memiliki banyak masyarakat kurang mampu yang terdata dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai. Rata-rata penduduk di Semarang Utara hanya bekerja sebagai buruh lepas dan nelayan yang tidak pasti penghasilannya mengakibatkan banyaknya warga yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan pangan perhari. Kondisi lapangan yang terlihat memang benar adanya, salah satu narasumber yang menjadi target pelaksanaan BPNT dinilai kurang mampu dalam pemenuhan makan perhari dan memakan 80% pendapatan dalam pemenuhan konsumsi pangan perharinya.

2. kekurangan pada implementasi adalah kurangnya diberikan pemahaman pada warga terkait warga yang sudah mampu harusnya mengkonfirmasi kepada aparat RT/RW atau kelurahan terkait agar tidak mengambil Bantuan Sosial apapun. Ini yang menyebabkan bantuan pangan kurang tepat sasaran dikarenakan masyarakat mampu yang harusnya tidak menerima bantuan masih menerima bantuan dikarenakan tidak konfirmasi kepada aparat terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly
Pres
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.